

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur dewan komisaris memiliki pengaruh yang kuat pada tindakan yang akan dilakukan dewan komisaris dan manajemen puncak yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Kim, *et.al*, 2009). Selain itu pada era globalisasi saat ini, para pemegang saham juga mulai menuntut peran dan tanggung jawab dewan komisaris untuk memenuhi harapan mereka. Salah satunya melalui komposisi dewan komisaris yang beragam (*board diversity*).

Keberagaman merupakan salah satu unsur yang harus dipertimbangkan untuk menentukan susunan anggota dewan komisaris yang juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha. Aspek keberagaman dalam komposisi dewan komisaris dapat dilihat dari beberapa unsur yang meliputi keahlian atau pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin. Semakin tinggi keberagaman dari struktur dewan komisaris akan menambah keyakinan bahwa keputusan yang diambil perusahaan akan mampu memaksimalkan nilai perusahaan (Hanani & Aryani, 2011). Pendapat yang sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ararat, *et.al* (2010) yang menyatakan bahwa *board diversity* yang positif dapat memberi keunikan karakteristik yang membantu agar penciptanya nilai tambah bagi perusahaan. Semakin beragam dewan komisaris membantu mengurangi masalah agensi yang kerap membuat melemahnya tata kelola perusahaan (Byoun, *et.al*, 2016).



Menurut Fama (1980) dalam penelitian Wang, *et.al* (2015), komisaris independen adalah sistem pengendalian internal inti untuk tata kelola perusahaan. Banyak penelitian mengidentifikasi komisaris independen sebagai organisasi yang bertujuan untuk memecahkan masalah keagenan yang timbul karena pemisahan kepemilikan dan hak manajerial. Komisaris independen juga merupakan institusi penting untuk mengawasi dan menyeimbangkan perusahaan di tingkat manajerial.

Reformasi BUMN Indonesia mencakup implementasi reformasi kepemilikan campuran. Salah satu inti reformasi ini adalah memperbaiki tata kelola BUMN. Untuk mencapai tujuan ini, langkah pertama adalah meminta keterlibatan aktif dewan komisaris dalam kinerja perusahaan. Namun, fungsi komisaris independen tidak bisa diabaikan. Komisaris independen pada BUMN menjadi penting karena independensi dan profesionalismenya. (Wang, *et.al*, 2015)

Di Indonesia, reformasi perusahaan BUMN tertulis dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003. Dalam ketentuan umum Undang-Undang tersebut, dewan komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dewan komisaris juga wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, kemandirian, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Reformasi BUMN mencakup restrukturisasi dewan komisaris dalam rangka penyehatan BUMN. Restrukturisasi dewan komisaris dilakukan agar dapat memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Reformasi BUMN dikatakan berhasil jika dapat menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan baik dan membuktikannya kepada para

pemegang saham sehingga para pemegang saham akan kembali menanamkan modalnya baik melalui pasar saham, obligasi maupun dalam sektor riil.

Penerapan GCG tidak terlepas dari keberadaan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan untuk memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris. Untuk mengidentifikasi apakah komisaris independen telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, perlu untuk menganalisis latar belakang mereka. Hal ini disebabkan independensi dan profesionalisme komisaris independen terkait erat dengan latar belakang mereka. Latar belakang komisaris independen merupakan latar belakang profesional dari komisaris independen (Wang, *et.al*, 2015)

Penelitian ini menguji pengaruh keberagaman latar belakang komisaris independen terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Penelitian ini ditujukan sebagai bukti empiris mengenai hubungan *board diversity* terhadap kinerja keuangan BUMN yang diperlukan untuk memberikan masukan pada program reformasi BUMN.



1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah jumlah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah keberagaman latar belakang komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah latar belakang dari komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberagaman latar belakang komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh latar belakang dari komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi perusahaan, khususnya Komite Nominasi dan Remunerasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan terkait dengan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota dewan komisaris kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



2. Bagi akademisi dan pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai *corporate governance* khususnya keberagaman latar belakang dewan komisaris.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu terkait struktur *corporate governance* dan *board diversity*. Pada bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini menjelaskan kajian literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar acuan penelitian diantaranya *stewardship theory*, *resource dependence theory*, *board diversity*, dan analisis kinerja keuangan perusahaan. Selain itu juga memuat *review* hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta kerangka pemikiran.

3. BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metoda pengumpulan data dan metoda analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dari data yang digunakan, pengolahan data, hasil dari analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V PENUTUP



Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

